BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005:36)Pemerintahan adalah seua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangakan yang di sebut dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelindugan kebutuhan, kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Syafie (1998:18) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan (eksekutif) pengaturan (legislatife) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pemerintahan pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah, secara baik dan benar. Dari pengertian yang di rujuk ini, dapat di katakana bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu sendiri di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Suryaningrat (1978:2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemeintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksankan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak di gunakan (Nugroho, 2003:36).

Menurut Ndraha (2005:57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersfat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Dari penjelasan di atas, bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan.Namun di dalam menjalankan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang di sebut kebijakan pemerintah.

Apabila di tinjau dari defenisi pemerintah, Syafie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsure yaitu:ada dua pihak yang terkandang, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integrasi Negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangung secara damai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Menjamin di terapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan setatus apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalm bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemudian Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa:

Fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan sekunder.Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang di perintah.Arti fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang di perintah, semakin menngkat fungsi primer pemerintah.Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa jasa publikyang tidak di privatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrsi.Kedua jenis fungsi itu di singkat sebagai pelayanan (serving). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, di jalankan oleh semua bangsa dan Negara di seluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Juga fungsi ini telah banyak di bahas orang dan di pelajari oleh semua ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, dan di aplikasikan secara luas, baik di bidang privat, publikmaupun sosial. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang di perintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *braganng position* dan semakin interaktif masyarakat yang di perintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Konsep Otonomi Daerah.

Menurut Tjahya (1996:20) Otonomi daerah berasal dari istilah "Autos" berarti sendiri, dan "Nomos" berarti pemerintah. Jadi otonomo berarti "pemerintahan sendiri" dan secara dogmtis pemerintahan di sini di pakai dalam arti luas. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling) juga mengandung arti pemerintahan.

Menurut Josep (1996:20) mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintahan sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang di beri wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep bahwa suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan unsure yang di serahkan oleh pemerintah pusat.
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

Menurut pendapat Gerry Stoker dalam Yasin (2014:14), munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi yang melanda inggris pada pertengahan abad ke-18. Industrialisasi menyeebapkan perpindahan penduk dari desa k kota sesecara besar-besaran atau bisa disebut urbanisasi. Urbanisasi tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah. Muncul wilayah-wilayah baru terutama di kota-kota dan di pinggiran kota yang sangat padat dengan cirri khas perkotaan. Kondii tersebu t memunculakan masalah baru di bidang sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meresspon hal tersebut perlu pengaturan kembali sistem kemasyarakatan yang mengatur kepentingan masyarakat yang baru tubuh tersebut.

3. Desentralisasi

Desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengam bilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi Negara. Dalam pasal (1) ayat 7 UU No. 2 Tahun 2004, dsentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerinah kepada daerah otonom untuk mengatur dan menngurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut M. Faltas terdapat dua kategori dalam pegambilan keputusan: 1). Keputusan politik (political authority) yaitu decisions that are allocative, the commit pulic funds, the coercive power of gevermental regulation and other public value, to authoritatively chosen ends, dan 2). Keputusan administratif/administrative authority yaitu decisions of implementation about now a nd where resources have to be used, who would quality for services resulting from the allocation and whether the allocated resources have been properly used. Berkenaan dengan pengertian tersebut maka keputusan poliik sering di sebut juga keputusan alokasi, sedangakan keputusanadministratifsering pula di sebut dengan keputusan pelaksanaan.

Menurut Logemann dalam Tjahya (1996:20) menyebut utir 2 dan 3 sebagai desentralisasi. Logemann memasukan dekonsentrasi sebagai bagian dari desentralisasi.Dengan demikian deesentralisasi memmpunyai arti yang luas. Logemann membagi desentralisasi menjadi dua macam, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (ambtelijkedecentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan Negara yang tingkatannya lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalammelaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya pelimpahan dari me3ntri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi semcam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat derah tidak ikut campur.
2. Desentalisasi ketatanegaraan (*staatkundige decentralitatie)* yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (regelende en bestuurende bevoerheid) kepada daerah-daerah otonom dilingkungannya. Dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memamfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilannya) ikut serta didalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi ini di bedakan menjadi dua yaitu:

a. Desentralisasi territorial, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi territorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
b. Desentalisasi fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturannya adalah pada jenis fungsi.

Menurud Hanif (2005:5) desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrumen dalam bidang *division of power*.Maksudnya, dua konsep

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut merupakan konsep administrasi, yaitu bagaimana proses-proses kegiatan untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan manajemen.Dengan demikian menjadi jelas bahwa baik desentralisasi maupun dekonsentrasi bermula dari sentralisasi dalam organisasi. Oleh karena itu, konsep sentralisasi dan desentralisasi bukanlah suatu konsep yang dikotomis, tapi suatu rangkaian kesatuan. Dalam organisasi Negara, tak ada yang sepenuhnya sentralisasi atau sepenuhnya desentralisasi. Karena implementasi dari kedua konsep tersebut tetap dalam lingkup suatu organisasi.

4. Teori Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang memiliki makna yaituseperankat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007;845) “peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individudalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut.Dalam hubungan timbal balik tersebut kedudukan dan peranan individu mempunyai keseimbangan dan kepentingan individu.

Peranan menurut Soekanto (2007:212) Peranana merupakan aspek dinamis kedudukan, Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto,2013;213).

Menurut Soekanto (2013;213) peranan mencakupi tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini adalahrangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat di artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Masih menurut Soekanto (2013;216) pembahasan perihalaneka acamperanan yang melekat pada individu-individu penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus di laksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seharusnya diletakan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang takmampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaanya memerlukan pengorbaanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang.

Adapun peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis dalam menertibkan Prostitusi/tertib sosial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Mentri Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, seperti:

1. Tindakan preventif seperti memberikan penyuluhan dan pengawasan.
2. Tindakan penertiban seperti memberikan peringatan lisan maupun tertulis.
3. Tindakan refresif seperti melakukan razia.

5. TeoriKebijakan Publik

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom), karena kebijaksanaan merupakan suatu aturan yang sudah di tetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, di atur dan di layani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli adalah Dye dalam Syafiie, (2006;105) dimana di katakana kebijakan publik adalah apapun juga yang di pilih pemerintah apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010;38) kebijaksanaan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan dalam Adisasmita (2011;213) kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

> Defenisi kebijakan publik di atas dapat di simpulkan bahwa: (1) kebijakan public di buat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, (3) kebijakan publik adalah tindakan pemillihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik (dalam Pasolong, 2010;39).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan publik.kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintah melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena iti terlalu salah bila dikatakan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses mengambil dan menetukan keputusan pemerintah (Sumaryadi, 2010;83)

Kata kebijakan di terjemahkan dari kata *policy*.Kata *policy* berasal dari bahasa yunani dan sansekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan sansekerta;*polis* (Negara kota)dan *pur* (kota). Dikembangkan kedalam bahasa latin menjadi *politea* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pada abad pertengahan, dikenal dengan *policy* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Pada hakekatnya berarti kebijakan yang di ambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan warga kota atau masyarakat (Sumaryadi, 2010;83). Dye (dalam Santoso, 2012;27) memberikan defenisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan publik sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan.Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan sangat menetukan karena implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang di ambil dapat dilaksanakan dan berdaya guna atau efektif karena mencapai sarana sehingga kebijakan tersebut mengara pada kebijakan publik.

Menurut Sumaryadi (2010;85) secara etimologis implementasi berasal dari kata bahasa inggris yatu *to implement* berarti menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu. Dan *to give* untuk menimbulkan efek/dampak.Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

Implementasi kebijakan menurut Agustiono (2008;139) adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukansuatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

> Impleentasi kebijakan menurut Sumaryadi (2010;87) adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau mrealisasikan kebijakn yang telah di tetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan sebuah proses. Proses kebijakan tidak hanya dilakukan dalam tahap formulasi saja. Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, wahab (dalam Sumaryadi, 2010;88) menybutkan ada tiga unsure penting dalam proses impleentasi yaitu:

a. Adanya program atau kebijakan yang di laksanakan.
b. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan di harapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Unsure pelaksana, baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Santosa (2012;43) adalah aktifitasaktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kewajiban secara eefektif. Implementasi ini merupakan suatu pelaksanaan aneka ragam program yang di maksudkan dalam suatu kebijakan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu di ketahui fariabel dan factor-faktot yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu Implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat di pakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah model impementasi yang di kemukakan oleh George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempegaruhi imlpementasi kebijakan.

6. Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraan dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib”yang pengertianya menurut Poerwadarminta adalah “Tentram ialah aman atau(tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang. Ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran).Selanjutnya tertib ialah aturan, tertib hukum yaitu aturan yang berkaitan dengan hukum.Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku yanng

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. “(sumber:ringkas teori blogspot .com/10juni2012).

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Ermaya Suradinata ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakkan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban di masysrakat.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengenai ketentuan umum di sebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat dengan Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketrtiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Defenisi pamong praja menurut (Wasistiono 1999) adalah aparatur pusat maupun daerah yang di didik secara khusus untuk menjalankan tugas pemerintah dengan Kopetensi dasar koordinasi, Kolaborasi, dan Konsensus, dalam rangka memberikan pelayananumum serta menjaga keutuhan Negara Republk Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 fungsi Satpol PP adalah:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyatrakat serta perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ktertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
e. Pelaksanaan Koordiasi Perlindungan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri SipilDaerah, atau aparatur lainnya.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010.

8. Penyakit Masyarakat (prostitusi)

Penyakit masyarakat adalah semua perilaku sejumlah warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat.

Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau*pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan. Perkins dan Bennet dalam Koendjoro (sumber: eprints.uny.ac.id)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendepenisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang di sepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.

Senada dengan hal tersebut, Supratikya (sumber: eprints.uny.ac.id) menyatakan bahwa prostitusi adalah memberikan layanan hubungan sesksual demi imbalan uang.

Selain defenisi di atas dengan rumusan kalimat yang berbeda, Kartono (2013;216) menjabarkan defenisi dari prostitusi adalah:

a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola orgganisasi implus/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prosmiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
b. Prostitusi merupakan pristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
c. Prostitusi ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan dirinya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelaku prostitusi di sebut dengan *prostitue*atau yang lebih kita kenal dengan pelacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih di kenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih di kenal dengan sebutan “gigolo”.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Koentjoro mendepenisikan wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan di anggap tidak memiliki adap dan sopan santun dalam berhubungan seks.sedangkan gigolo di jelaskan secara singkat yang di pahami sebagai laki-laki bayaran yang di pelihara atau di sewa oleh seoranng perempuan sebagai kekasi atau pasangan seksual. (sumber:eprints.uny.ac.id)

Menurut Bonger (dalam Kartono,2013;214) memberikan defenisi prostitusi sebagai gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.

Cirri-ciri Pelacuran menurut Kartono (2013;239) menyatakan cirri-ciri khas dari pelacuran ialah sebagai berikut:

a. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
b. Cantik, ayu, rupawan, manis, aktraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsng selera seks kaum pria.
c. Masih muda-muda, 60% dari jumlah pelacur di Kecamatan Kandis berusia 30 tahun, yang terbanyak adalah 17-25 tahun, pelacur kelas rendah dan kelas menenga acap kali memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-15 tahun, yang di tawarkan sebagai barang baru.
d. Pakaian sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum peria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriyahnya, yaitu: waja, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang.
e. Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/daerah yang satu ke daerah yang lainnya.

Banyak setudi yang telah di lakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai factor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelcur. Weisbreg (Koentjoro,2004) menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
b. Motif ekonomi secara sadar menjadi factor yang memotifasi. Motif ekonomi ini yang di maksud adalah uang.
c. Motif situasinal, termasuk di dalamnya penyalah gunaan kekuasaan orang tua, penyalah gunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubunga dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti penngalaman seksual diri dan pristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus di temukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanannya sebelum menikah atau hamil di luarnikah (sumber:eprients.uny.ac.id).

Berbeda dengan pendapat diatas, Greenwald (Koentjoro, 2004;53) mengemukakan bahwa factor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidak bahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktian tubuh yang menarik melalui kontrakseksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur (sumber:eprients.uny.ac.id).

Kemudian secara rinci Kartono (2013;45) menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:

a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak pria untuk mnghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang perhatian, kurang pendidikan, dan buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran.
b. Adanya nafsu-nafsu seks yang ubnormal, tidak teintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
c. Tekanan ekonomi, factor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan klangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan setatus sosial yang lebih baik.
d. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan dan ketamakan terhadap pakain-pakaina indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah namun malas bekerja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Konpensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, temen putrid, tante-tante.
f. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah sesk, yang kemudian tercebur kedunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks.
g. Anak gadis membrontak terhadap otoritas oran tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks, juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang di anggap telalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
h. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi sek atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital seks relation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati ”masa indah di kala muda”.
i. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan yang kurang mampu dan kotor dengan lingkungnnya yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila. Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
j. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo,terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
k. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: filim-filim baru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikan seks dan lain-lain.
l. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
m. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, di sebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan setandar hidup yang tinggi, memilih lebih suka melacurkan diri dari pada kawin.
n. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawn lagi atau hidup bersama denngan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sengsara batinnya, tidak bahagia, membrontak, lalu menghibur diri terjun kedlam dunia pelacuran.
o. Mobilitas atau jabatan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
p. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan setatus sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.
q. Ada anggapan bahwa wanita lebih di butuhkan dalam bermacam-macampermainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
r. Pekerjaan sebagai pelacur tidak membutuhkan keterampilan/sekill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah di kerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberaniaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

s. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduaan obat bius (ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alcohol tinggi, dan lain-lain. Banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut. Oleh pengalaman-engalaman traumatis (luka jiwa) dan shok mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan di madu, ditipu sehingga muncul kenatangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
t. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat di simpulkan bahwa factor-faktor yang melatar belakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat di bagi menjadi dua, yaitu faktor internal, dan faktoreksternal.Faktorinternal berupa rendahnya setandar moral dan nafsu seksual yang di milki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh setatus sosial yang lebih tinggi.

Dalam bagian ini akan di ketengahkan secara garis besar beberapa pola prostitusi sebagai berikut:

1. Pelacur Bordil: yaitu peraktek pelacuran, dimana para pelacur dapat di jumpai di tempat-temoat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana di tiap bordil di jumpai di miliki oleh orang-orang yang namanya germo.
2. Pelacur panggilan (Call Girl Prostitution) praktek pelacuran, dimana si pelacur di panggil atau di pesan ketempat lain ya ng telah di tentukan, mungkin di hotel atau wisma di daeah tersebut. Pelacuran panggilan biasanya di koordinir secara rapid an terselubung. Namun ada pula wanita-wanita yang secara individual berprofesi sebagai “gadis panggilan” yang bisanya di hubungi via telefon atau perantara-perantara (calo-calo).
3. Pelacuran jalan, (Street Prostitution): ini merupakan bentuk prostitusi yang panjang menyolok. Di kota-kota besar kerap kali orang denngan mudah dapat menjumpai wanita yang berdandan dan berbaris menyolok, solah-olah menjajakan diri, untuk di bawa oleh yang menghendakinya. Biasanya pelacur yang di jalan di bawa ke hotel-hotel murahan, atau kebordil atau kemana saja sesuka yang membawa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Disamping itu terdapat protitusi ” prostitusi semu” atau prostitusi terselubung, biasanya berkedok pada beberapa kegiatan yang di ijinkan atau di abaikan seperti umpmanya tukang pijat muda dan cantik yang menunggu di hotel-hotel ada diantaranya yang melakukan pelayanan lebih dari sekedar memijat, juga di beberapa tempat-tempat seperti karoke di antaranya yang melakukan tugas sampingan lebih darin sekedar temn dansa atau sekedar teman minum.

Pelacuran meliputi yang dilakukan secara terang-terangan dan secara diam-diam. Dalam golongan pertama dapat dimasukan pelacura dalam arti sempit, yang menjalankan pelacuran bai sebagai pekerjaan yang tetap atau tidak tetap. Menurut tempat dan tariff yang mereka pungut, maka mereka dapat di bagi lagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Golongan rendah. (a) pelacur yang bergelandang di tempat-tempat umum dan bisa di sebut street prostitute. (b) pelacur yang bersarang di tempat-tempat pelacuran di kampung tarifnya amat rendah , sebagai langganan umumnya adalah buruh-buruh pabrik, pedagang kecil, atau pekerjaan-pekerjaan orang yang berpenghasilan masih di bilang kecil, tetap kadang-kadang terdapat pula tingkat yang punya duit atau pemuda-pemuda iseng yang hanya ingin melepaskan seksualnyadengan pelacur-pelacur tersebut. Golongan ini merupakan bahaya dari masyarakat baik oleh karena itu sebagian besar dihinggapi penyakit kelamin karena tidak di tempatka di bawa pengawasan dokter, maupun dapat merusak jiwa dan kesehatan pemuda-pemuda tersebut.
2. Golongan menengah, pelacur yang bersarang di rumah-rumah penginapan atau rumah-rumah bordil yang cukup baik biasanya berparas cantik, berdandan baik dan mempunyai tingkah laku yang lebih sopan, tarifnya lebih tinggi dari golongan (a), yang menjaja lagi umumnya golongan yang berduit, pada golongan ini mereka sangat memperhatikan kesehatannya, dan sering memeriksakan diri ke dokter sehingga tidak di khawatirkan lagi kesehatannya.
3. Golongan atas, pelacuran yang bersarang di hotel-hotl besar, atau pelacur yang mempunyai rumah sendiri. Paras pakaian lebih sempura jika dibandingkan dengan golongan lainnya, dan tarifnya pun lebih tinggi. Didalam golongan ini dapat disediakan pelacur-pelacur yang menyediakan dirinya untuk di panggil atau pesanan, umumnya mereka sangat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperhatiakanperawatanmedis.
(sumber:www.Kesimpulan.com/prostitusi)

Dalam golongan kedua dapat disebut mreka yang tidak secara terang-terangan tetapi secara diam-diam melakukan pelacuran, mereka yang sekedar mncari tambahan penghasilan merupakan amatrices, luasnya pelacuran semacam ini sukar di ketahui dan merupakan bahaya yang tidak tampak. Dalam golongan ketiga dapat dimasukan mereka yang melakukan pelacuran sekedar mencari pengalaman, yang bisa dilakukan orang baik-baik , kadang-kadang bersuami, dengan maksut untuk peningkatan setatu sosialnya. Disamping golongan-golongan tersebut dapat pula di sebut praktek prostitutie yang bercorak ragamnya dari seorang babu hingga istri-istri simpanan. Berikut adalah bentuk-bentuk prostitusi:

1. Pelacuran yang tidak di organisir, si pelacur bebas menentukan tindakannya baik dalam pembiayaan kebutuhan hidupnya maupun dalam penerimaan uang. Paling-paling ia membayar untuk perantara dan lain-lain, ia memodali dirinya untuk keperluannya dan tidak terikat oleh suatu pihak. Kalua kebetualan yang berada di bordil atau rumah seorang germopun hanya perjanjian dengan si germo saja mengenai pembagian hasil dan lain-lain. Namun setiap saat ia bisa kembali ke kampung atau pergi kemana saja.
2. Pelacur yang diorganisir, pelacur-pelacur setelah datang kesatu tempat tertentu, terikat atau mengikatkan diri pada suatu “pengusaha” tertentu yang akan mengurus segala sesuatunya dan mentukan dimana si pelacur harus menjalankan perannya. Para pelacur tidak berhubungan diri dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat sekitarnya maupun dengan yang berwajib. Segalanya di urus oleh si penngusaha yang mempunyai kaki tangan yang bertindak sebagai perantara, pelindung dan lain-lain.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu yang meneliti tentang penyakit masyarakat atau prostitusi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3: Peneliti Terdahulu Mengkaji Tentang Penyait Masyarakat.

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	2	3
1.	Syafridoni (skripsi uir 2013)	Dari hasil penelitian Sayridoni tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam melakukan pengawasan terhdap panti pijat yang ada di kota pekan baru khususnya di kecamatan marpoyan damai, dalam haltersebut peran satpol pp dapat dikatakan masih kurang berperan dalammengatasi masalah tersebut, karena belum sepenuhnya masalah tersebut dapat teratasi dengan baik, dan tipe penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif.
2.	Bayu Syaputra (skripsi uir 2012)	Dari hasil penelitian yang dilakuka oleh bayu syaputra mengenai peranan satuan polisi pamong peraja dalam menertibkan warung remang-remang khususnya di kecamatan tualang kabupaten siak, dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa peran satpol pp dalam mengatasi masalah tersebut belum berjalan dengan baik,karena masih banyak permasalahan tersebut yang belum teratasi dan kegiatan tersebut pun masih dapat dijumpai di desa tersebut,
3.	Riswan Dika (skripsi uir 2012)	Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh riswan dika dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif penulis menyimpulkan bahwa peran satpol pp dalam menertibkan perjudian dan miras di kecamatan minas dalam haltersebut peneliti menyimpulkan bahwa peran satpol pp dapat dikatakan berperan, namun belum sepenuhnya peran tersebut berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak satpol pp tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3
4.	Yopi Kurniawan (skripsi uir 2015)	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh yopi kuriawan dengan metode yang digunakan ialah metode kualitatif, penulis menyimpulkan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan prostitusi di hotel berbintang khususnya di kota pekan baru dalam haltersebut peran satpol pp cukup berperan dalam mengatasi masalah tersebut, dan permasalahan tersebutpun dapat dikatakan sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Sumber : Modifikasi Peneliti 2017

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas maka persamaan dan perbedaan penelitian dari Syafridoni peneliti tahun2013 ialah sama-sama meneliti tentang penanganan penyakitmasyarakat, sedangakan penelitiannya menggunakan metode kuantitatiif, dan yang diteliti maupun letak lokasi penelitianyya berbeda. Sedangkan penelitian terdahulu menurut Bayu Saputra peneliti tahun 2012 persamaan dan perbedaanya ialah sama-sama meneliti tentang penanganan penyakit masyarakat, sama-sama meneliti hal yang sama, namun perbedaanya terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan penelitian terdahulu meneurut Riswan Dika tahun 2012 persamaan dan perbedaanya ialah sama-sama meneliti tentang penanganan penyakit masyarakat, menggunakan metode yang sama, dan perbedaanya terletak pada hal yang diteliti dan lokasi penelitiannya. Sedangkan menurut Yopi Kurniawan tahun 2015 persamaan dan perbedaannya ialah sama-sama meneliti tentang penanganan penyakit masyarakat, menggunakan metode yang sama,dan perbedaanya terletak pada lokasi dan indikator penelitian.

Pada jurnal yang dikemukakan oleh Rizal Khairul Amripenelitian tahun 2012 (Universitas Indonesia) dalam judul pelaksanaan kinerja satuan polisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pamong praja dalam menegakkan pelanggaran peraturan daerah di kabupaten blora dalam hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi,dan dapat dikatakan baik, karena sudah sesuai dengan SOP, baik dalam penegakan hukum maupun dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan kinerja satpol pp seperti melakukan pembinaan internal secara intensif yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan internal dan pelatihan, serta pendidikan.

Pada jurnal yang dikemukakan oleh Julia Ardila penelitian tahun 2012 dengan judul upaya kepolisian dalam penanggulangan prostitusi di kota Bandar lampung, ia menyimpulkah bahwa kinerja yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dengan dibantu oleh oknum anggota satpol pp tersebut masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang mengganggu kinerja para oknum anggota kepolisian tersebut, sehingga peraktik tersebut masih ditemukan di darah tersebut, dan di duga ada oknum yang membantu/melindungi parktik prostitusi tersebut sehingga kegiatan tersebut masih terus dapat berjalan.

Pada jurnal yang dikemukakan oleh R. Christyna Pardede penelitian tahun 2008 dengan judul upaya kepolisian dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan prostitusi, ia menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menanganai masalah tersebut belum berjalan dengan maksimal, dan menerut hasil penelitian yang ia peroleh masalah tersebut sulit untuk di tangani secara tuntas karena faktor yang timbul dari masalah tersebut terdapat pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesadaran individu itu sendri dan masih kurangnya moral agama dalam individu itu sendri, serta faktor ekonomipun masih jadi alasan untuk mereka dapat melakukan kegiatan tersebut.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan variabel penelitian kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indicator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna.

Gambar II.I:Model Kerangka Pikir Penelitian Tentang Peranan Satuan Polisi PamongPraja Dalam Melakukan PenangananPenyakit Masyarakat Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahan agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang di operasionalkan melalui indicator sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perankat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis dalam menertibkan prostitusi di kafe-kafe yang ada di Kecamatan Kandis.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang di maksud di sini adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud di sini adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat dengan Satpol PP Kecamatan Kandis yang berada di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 76 Kandis tepatnya yang berlokasi di kantor camat kandis.
6. Ketertibandan Ketentraman Masyarakat yang di maskud di sini adalah keadan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

7. Prostitusi yang di maksud di sini adalah seseorang yang bertugas memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.
8. Kafe-kafe yang di maksud di sini adalah tempat-tempat hiburan malam yang berada di wilayah kecamatan kandis.
9. Tindakan preventif disini adalah tindakan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis dengan memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan dan menertibkan prostitusi yang terjadi di Kafe-kafe yang ada di wilayah Kecamatan Kandis.
10. Tindakan refresif di sini adalah tindakan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis dengan cara melakukan razia ke Kafe-kafe di Kecamatan Kandis yang terdapat prostitusi.
11. Tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan atau tertulis kepada pihak pemilik Kafe yang ada di Kecamatan Kandis terkait dengan larangan prostitusi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12. Oprasional Variabel

Tabel II.I: Oprasional Variabel Penelitian Tentang "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak"

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian
1	2	3	4
Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Soekanto (2007:212).	Peranan	1.penyusunan program dan peaksanaan penegakan perda	a.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pengawasan oleh Satpol PP terkait dengan perlindungan masyarakat. b.mendeskripsikan tentang program-program yang akan di laksanakan oleh Satpol PP terkait tentang penyakit masyarakat
		2.pelaksanaan kebijkan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di daerah	a.melakukan tindakan preventif, refrensif, penertiban. b.memberikan sanks bagi yang melanggar ketentraman dan ketertiban
		3.pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.	a.melakukan razia. b.melakukan sosialisasi tentang perda pelarangan penyakit masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
		4.pelaksananan perlindungan masyarakat	a.melakukan penangana terhadap masyarakat yang melanggar hukum b.melakukan penanganan terhadap warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban.
		5.pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah.	a.penegakan perda. b.ketentraman dan ketertiban dimasyarakat
		6.pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mentaati perda.	a.melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum b. larangan pekat.

Sumber: modifikasi penulis 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :